



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL HARIS**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG PERENCANAAN DAN SUMBER DAYA**
3. NHK : **916302**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.150.000.000
------------------------------	------------	----------------------

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.125.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/40 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 6.000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, Rp. 1.125.000.000
4. Tanah Seluas 3.333 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	208.000.000
---------------------------------------	------------	--------------------

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S A/T/MINUBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 55S/SO1.0 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA JUPITER BEBEK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	373.000.000
----------------------------------	------------	--------------------

D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
--------------------------	------------	-------------

E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	258.673.748
------------------------------	------------	--------------------

F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
-------------------------	------------	-------------

Sub Total	Rp.	3.989.673.748
------------------	------------	----------------------



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.989.673.748

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.